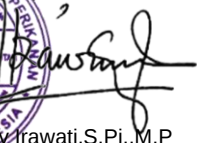


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	/BPPMHKP.SMG/OT.310/VI/2026
	Tanggal Pembuatan	15 Juni 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	18 Juni 2026
	Disahkan oleh	 Kepala Balai  Henry Irawati, S.Pi., M.P
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nama SOP	SOP Uji Konsekuensi
BPPMHKP Semarang	Kualifikasi Pelaksana :	
Dasar Hukum :	Keterkaitan :	
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Permen KP No. PER.04/MEN/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kealutan dan Perikanan; 4. Permen KP No.43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Mempunyai communication skill 3. Kemampuan Pendokumentasian Informasi	
Tujuan :	1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi		
Peringatan :		
1. Pencatatan dan Penggandaan Buku Tamu dan Daftar Pemohon		

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID	Bidang Uji Konsekuensi PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dengan melibatkan secretariat PPID bidang uji konsekuensi	Mulai			Dokumen informasi publik, peraturan per UU an	5 Menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2.	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian	5 Menit	Daftar permohonan dalam aplikasi	Asistensi pencarian informasi, login ke aplikasi
3.	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima maka informasi publik akan dibuka. Jika informasi publik ditolak maka akan ditutup	Selesai	Ditolak		Dokumen informasi publik, peraturan per UU an	5 Menit		
4.	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada atasan PPID		Diterima		Konsep SK	30 hari kerja	Surat	
5.	Menetapkan keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan			Selesa	Konsep SK	30 hari kerja	Memo	